



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

### SIARAN PERS

#### Anggota V BPK Serahkan LHP LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022

**Serang, 11 April 2023** – Anggota V BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten dan Pj. Gubernur Banten. Bertempat di Kantor DPRD Provinsi Banten, Anggota V BPK **Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten **Andra Soni** dan Pj. Gubernur Banten **Dr. Al Muktabar, M.Sc.** dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten (11/4).

Pemeriksaan atas LK Pemerintah Daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Provinsi Banten Tahun 2022, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal** atas LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022.

Penekanan Suatu Hal tersebut terkait Catatan atas akun Aset Lain-lain berupa Saldo Kas di Rekening Penyidik pada Rekening Penerimaan Lainnya Kejaksaan Tinggi Banten yang merupakan Uang Sitaan Kejaksaan Tinggi Banten dan kerugian daerah pada kasus Pajak UPT Kelapa Dua yang belum dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dan SK Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah yang belum didukung dengan jaminan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-tujuh kalinya.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Banten, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum memadai. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern berdampak pada terjadinya kecurangan dalam penerimaan pajak daerah yang telah mendapatkan putusan pengadilan;
2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan;
3. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan dan Perencanaan pada Lima Perangkat Daerah tidak sesuai ketentuan; dan
4. Pelaksanaan 42 Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana Utilitas dan Umum Permukiman tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Bersamaan dengan penyerahan LHP atas LK Pemerintah Provinsi Banten ini, BPK menyampaikan pula Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Banten. IHPD tersebut memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Banten selama tahun 2022. BPK berharap IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

### **SIARAN PERS**

Dalam sambutannya, **Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit** menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan Laporan Pemantauan Semester II Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten telah menindaklanjuti 1.385 rekomendasi dari 1.684 rekomendasi atau 82,24% dari keseluruhan rekomendasi periode 2005 – 2022. Dengan demikian masih terdapat 299 rekomendasi (17,76%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

**Ahmadi Noor Supit** berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. “Perlu saya sampaikan juga bahwa sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan dari Pemerintah Provinsi Banten atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap **Ahmadi Noor Supit**.